

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang dijadikan dasar dalam penelitian. Tahun 1976 teori keagenan pada awalnya dikenalkan oleh Jensen dan Meckling. Teori keagenan menjelaskan *principal* dan *agent* yang merupakan pelaku ekonomi yang saling bertentangan. *Principal* terdiri dari pemilik saham (*stakeholders*), dan *agent* ialah pihak manajer perusahaan. (*Teori Keagenan (Agency Theory)*, 2016) Jensen dan Meckling (1976) memberi penjelasan mengenai hubungan keagenan bahwa: “*agency relationship as a contract under the principals engage the agent to perform some service on their behalf which involves delegating some decisionmaking authority to the agent*”.

Pernyataan tersebut menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara prinsipal selaku pemberi instruksi kepada agen untuk mengatasnamakan prinsipal dalam bertindak, serta agen mendapat otoritas untuk mengambil keputusan yang memberi keuntungan bagi prinsipal. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan agensi yang timbul sebagai akibat dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama tetapi memiliki tujuannya masing-masing (Agustini & Siregar, 2020).

Agency theory memberi penekanan pentingnya mneyerahkan kepada tenaga profesional (*agency*) dengan pemahaman lebih dalam terkait hal pengelolaan perusahaan. (Hamdani, 2016) Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan efisiensi

biaya melalui pengelolaan perusahaan oleh orang-orang yang professional dibidangnya. Teori ini memfokuskan dasar hubungan antara prinsipal dan agen melalui penentuan kontrak terefisien. Agen membuat kontrak yang dapat membantu prinsipal dalam memenuhi kepentingan seluruh pihak. Kontrak efisien apabila 2 faktor berikut kontrak tersebut terpenuhi, (1) jumlah informasi yang diperoleh adalah sama dan kualitas laporan yang sama tanpa adanya hal-hal yang ditutupi atau informasi tertentu yang disembunyikan demi kepentingan pribadi agen maupun prinsipal, dan (2) agen memiliki kepastian tinggi terkait imbalannya.

Manajer memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan modal dan menjalankan perusahaan, serta membuat keputusan untuk kelancaran perusahaan dan memberi pertanggungjawaban atas modal yang dikelola melalui pelaporan setiap rencana dan tindakan yang telah dilakukan secara terbuka. Prinsipal juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. *Principal* harus memperhatikan dan memberikan apresiasi baik dalam bentuk penghargaan, bonus atau imbalan kepada manajer atas kerja kerasnya dan melakukan pengendalian dan pengawasan, memperhatikan laporan pertanggungjawaban, mengganti manajemen perusahaan dengan orang yang lebih kompeten jika manajemen tersebut dinilai tidak memenuhi tanggungjawab yang diberikan, dan menerima *return* atau imbalan sebagaimana seharusnya yang harus diterima dari modalnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pihak prinsipal.

Konflik kepentingan dapat terjadi karena agen berkemungkinan bertindak tidak sinkron dengan yang diinginkan prinsipal, sehingga muncullah *agency cost* (biaya keagenan). Biaya keagenan adalah biaya yang digunakan prinsipal dalam

memberi pengawasan pada agen. Bagi perusahaan, hampir tidak mungkin untuk memiliki *zero agency cost*. Biaya keagenan dikeluarkan agar secara optimal manajer membuat keputusan dengan sudut pandang *shareholders* akibat ketidaksamaan kepentingan yang terdapat antar pihak. Jensen dan Meckling (1976) mengelompokkannya dalam 3 jenis, yaitu:

- a. *Cost of Monitoring*, yaitu biaya untuk *me-monitoring* tindakan *agent* yang ditanggung *principal*, seperti mengamati, mengukur, dan mengendalikan tindakan.
- b. *Cost of Bonding*, merupakan biaya dalam penetapan dan pematuhan mekanisme demi menjamin kepentingan *principal* yang ditanggung *agent*.
- c. *Residual Loss*, merupakan pengorbanan dari dampak perbedaan keputusan antara *agent* dan *principal* mencakup berkurangnya kemakmuran yang diperoleh pihak *principal*.

Scott (2000) mengatakan *agency theory* memiliki konsep kontrak antara *principal* dengan *agent*, *principal* yaitu pihak yang memberi pekerjaan pada *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*, dan pihak yang dipekerjakan untuk memenuhi kepentingan *principal* ialah *agent*. Inti *Agency Theory* adalah kontrak yang bertujuan menyeimbangkan keperluan prinsipal dan agen dengan rancangan yang tepat, ketika terjadi konflik kepentingan. Kebijakan akan hak dan kewajiban setiap pihak, pemanfaatan secara keseluruhan menjadi pertimbangan merupakan implementasi atau perwujudan dari *Agency Theory*. Kontrak kerja mencakup seperangkat aturan terkait mekanisme pembagian hasil, baik laba, imbalan maupun risiko-risiko yang telah disepakati oleh kedua pihak. Keoptimalan

kontrak kerja dapat tercapai jika kontrak tersebut menganut *fairness*, yaitu kesetaraan secara matematis antara prinsipal dan agen yang memberikan gambaran aktualisasi kewajiban agen dengan maksimal dan pemberian imbalan yang sesuai dari prinsipal.

(*Teori Agensi Menurut Para Ahli Dalam Praktek Akuntansi*, 2020) Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan adalah hubungan yang menggambarkan susunan dasar hubungan *principal* dan *agent* yang terlibat dalam suatu kerjasama, dengan perbedaan tujuan dan perbedaan sikap terhadap risiko. (Hamdani, 2016) Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa dalam teori keagenan digunakan 3 asumsi dari sifat atau karakter manusia, yaitu:

1. Asumsi mengenai sifat manusia, umumnya manusia mengutamakan dirinya sendiri (*self interest*), berdaya pikir terkait persepsi masa yang akan datang yang terbatas atau keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk averse*).
2. Asumsi mengenai keorganisasian, yang terkait konflik antaranggota, asimetri informasi, dan efisiensi aktivitas produksi.
3. Asumsi mengenai informasi, terkait pandangan bahwa informasi dapat diperdagangkan.

Ketidakpercayaan adalah dasar terbentuknya teori agensi, dapat dipastikan teori tersebut muncul dari postulat yang diungkapkan Adam Smith yang menyatakan manusia hidup dengan penuh kompetensi dan perlombaan, oleh karena itu, manusia berupaya sendiri dan mempertahankan kepemilikannya masing-masing (Wahyuni, 2018). Pengambilan keputusan untuk kedepannya

didasarkan pada informasi terkait hasil dari suatu keputusan yang dibuat saat ini. (*Penjelasan Teori Keagenan: Masalah Dan Cara Mengatasinya*, 2017) Terdapat 3 jenis konflik kepentingan yang berkemungkinan terjadi didalam suatu perusahaan, yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur, pemilik saham perusahaan dengan manajemen, dan manajemen dengan bawahan.

Sering terjadi ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam suatu perusahaan. *Agent* memiliki jumlah informasi lebih banyak terkait lingkungan kerja, kapasitas diri, dan perusahaan secara keseluruhan, akan tetapi *principal* tidak memiliki informasi yang lengkap terkait pencapaian *agent*. Informasi yang tidak sepenuhnya diketahui semua pihak, mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan informasi yang dimiliki. Ketidaksetaraan informasi yang terjadi antara *principal* dan *agent* disebut asimetri informasi (*information asymmetries*). Asimetri informasi merupakan kesempatan bagi manajer untuk melakukan *dysfunctional behavior*. Ketidaksetaraan informasi yang didapat manajer dan pemilik perusahaan menjadi peluang bagi manajer untuk memenuhi kepentingan pribadinya, salah satunya dengan manajemen laba.

2.2. Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) adalah aksi manajer perusahaan yang bertindak dalam mengintervensi nilai-nilai yang tercantum pada laporan keuangan disuatu perusahaan yang bertujuan mengecohkan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang penasaran dan ingin memahami kinerja dan keadaan perusahaan yang bersangkutan (Rianto & Herawaty, 2019). Menurut Healey dan Wahlen pada tahun 1999, manajemen laba yang terjadi dikarenakan

keputusan manajemen untuk mengubah laporan keuangan berakibat menyesatkan para *stakeholder* (H. Widyaningsih, 2017). Manajemen laba dapat terjadi karena adanya ketidaksamaan atau ketidaksetaraan antara informasi yang didapat oleh pihak pemilik saham dan pihak manajemen perusahaan atau yang disebut dengan asimetri informasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam teori keagenan.

Dengan kata lain, manajemen laba ialah tindakan yang disengaja oleh manajer perusahaan dengan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Tindakan manajemen laba dapat mengakibatkan menurunnya kualitas yang dimiliki suatu laporan keuangan, karena tidak memberi gambaran yang sebenarnya terkait keadaan perusahaan. (Banjarnahor & Yando, 2018) Perusahaan dengan laba selalu meningkat dari periode ke periode dengan stabil berakibat risiko perusahaan menjadi menurun. Penurunan risiko perusahaan lebih tinggi dibandingkan persentase akumulasi laba. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan manipulasi atau pengelolaan laba untuk meminimalisasi risiko perusahaan.

Menurut Ayres (1994), sasaran manajemen laba dalam beberapa unsur berikut dalam laporan keuangan:

1. Kebijakan Akuntansi, terkait penetapan waktu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan perusahaan yang merupakan keputusan manajer, antara diterapkan lebih dulu dari waktu yang direncanakan atau menunda hingga waktu kebijakan tersebut berlaku.

2. Pendapatan, terkait percepatan atau penundaan diakuinya pendapatan yang dimiliki perusahaan.
3. Biaya, dengan anggapan sebagai penambah dalam hal investasi atas biaya yang dikeluarkan perusahaan (*amortize or capitalize of investment*).

Manajer memiliki berbagai cara untuk manajemen laba. Cara manajer manajemen laba menurut Ayres (1994) diantaranya, yaitu:

1. Penentuan waktu yang tepat dari manajer untuk bertindak dalam hal manajemen laba dengan kebijakannya yang merupakan salah satu wewenang manajer terkait dengan seluruh aktivitas yang berpengaruh terhadap aliran kas dan menguntungkan secara pribadi.
2. Putusan manajer dalam penerapan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan perusahaan, seperti waktu pemberlakuan kebijakan yang ditetapkan tersebut.
3. Tindakan manajer mengubah atau mengganti metode akuntansi tertentu dan telah mendapat pengakuan dari badan akuntansi yang sah (*Generally Accepted Accounting Principles* atau GAAP).

(H. Widyaningsih, 2017) Menurut Healey dan Wahlen (1998), manajemen laba memiliki 2 aspek, diuraikan sebagai berikut:

- a. Melalui penggunaan *judgment* (perkiraan) dapat melakukan intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan.
- b. Tujuan untuk menyesatkan pihak-pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* terkait kinerja ekonomi perusahaan dari manajemen laba.

Terdapat 3 teknik untuk manajer melakukan manajemen laba yang bisa digunakan, yaitu:

- a. Pemanfaatan peluang dalam mengestimasi hal terkait akuntansi
- b. Perubahan penggunaan metode akuntansi
- c. Percepatan atau penundaan periode pendapatan atau biaya

Tindakan manajemen laba tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada perusahaan maupun pihak pemegang saham. Hal ini, bergantung pada dorongan utama atau maksud dari tindakan yang dilakukan oleh manajer. Motivasi utama dari manajer memajemen laba, terdiri dari tujuan oportunitis dan informasi (*signaling*) kepada pemilik saham. Tujuan oportunitis berdampak merugikan pengguna laporan, informasi diberikan dengan tidak akurat dan tidak memberi gambaran nilai pokok perusahaan. Kecurangan diimplikasikan dalam laporan keuangan ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang disebut *intertemporal choice* (kondisi eksekutif perusahaan tersebut terpaksa membuat keputusan tertentu saat menemukan situasi tertentu dalam pelaporan kinerja yang memberi keuntungan bagi diri sendiri). Kecurangan tersebut merupakan tindakan yang dirancang dan disengaja untuk penipuan yang mengakibatkan hilangnya kekayaan.

Berbeda dengan tujuan oportunitis, tujuan informatif (*signaling*) berkemungkinan memberi dampak positif pada pengguna laporan keuangan. Manajer memberi informasi peluang yang dicapai oleh perusahaan dimasa mendatang. Manajer bertanggungjawab mengambil keputusan terkait dengan aktivitas operasi maupun investasi perusahaan, sehingga informasi tentang

prospek perusahaan masa mendatang yang dimiliki manajer lebih baik. Manajer dapat mengestimasi laba masa mendatang dan menginformasikannya kepada pemilik saham atau pengguna laporan keuangan. Manajer memberi gambaran kinerja perusahaan melalui laporan laba dengan menggunakan diskresi akrual. Dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan maupun pemegang saham dari tindakan manajemen laba ini bisa positif ataupun negatif bergantung pada maksud atau tujuan utama dari pelaku saat memajemen laba perusahaan.

2.3. Good Corporate Governance (GCG)

Untuk menghindari manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba, diperlukan suatu tata pengelolaan perusahaan yang baik atau yang biasanya disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). (Hamdani, 2016) GCG berawal pada tahun 1980an yang pada saat itu terdapat gejolak ekonomi di Amerika Serikat. Akibatnya, banyak perusahaan melakukan restrukturisasi dengan melalui segala cara untuk mendapatkan kendali atas perusahaan. Tentunya hal ini mengakibatkan adanya protes dari publik yang memandang manajemen perusahaan telah mengabaikan kepentingan dari pemegang saham. Kegiatan *merger* dan akuisisi memberikan dampak negative bagi pihak pemegang saham dikarenakan kesalahan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Salah satu wacana untuk memberi jaminan terhadap hak-hak dari pemilik saham yang dilakukan adalah dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG).

Secara umum, *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang menjelaskan relasi antara manajemen, kreditur, karyawan, pemegang saham, pemerintah dan para *stakeholder* lain terkait dengan hak dan kewajibannya

masing-masing dengan kesetaraan pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders* menjadi pertimbangan. (Hidayat, 2016) Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IIGC), *Corporate Governance* adalah serangkaian metode yang bertujuan mengarahkan dan mengontrol perusahaan guna mencapai keinginan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait kegiatan operasional perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, *World Bank* mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan, hukum, dan pedoman yang mendorong kinerja sumber entitas berfungsi dengan efisien dan membuahkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkepanjangan bagi pemilik saham serta memiliki tujuan utama untuk menyetarakan segala kepentingan dalam perusahaan.

Menurut Watts & Zimmerman (1990), perusahaan menerapkan GCG dengan harapan dapat menghindari atau mengurangi adanya manajemen laba. (Yogi & Damayanthi, 2016) Dengan penerapan GCG pada suatu perusahaan, memberikan kepercayaan pada pemakai laporan keuangan bahwa laporan diinformasikan perusahaan dengan kondisi bebas dari tindakan yang menyimpang atau pelanggaran (*fraud*). (Kumaat, 2016) GCG merupakan salah satu syarat wajib bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham. Terdapat 3 perspektif hubungan antar pemangku kepentingan perusahaan pada GCG, yaitu:

1. Hubungan antara *internal stakeholders* perusahaan (BOD, manajemen, staf perusahaan)
2. Hubungan antar perusahaan (yang diwakili BOD) dan dewan komisaris (Board of Commissioners dan pemilik saham (*shareholders*) yang tercantum dalam RUPS)

3. Hubungan antara perusahaan dan *stakeholders*, yaitu *supplier*, *customer*, asosiasi bisnis, *creditor*, pemerintah, dan masyarakat.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) mengungkapkan terdapat 5 (lima) komponen utama penting dalam GCG (Chairunesia et al., 2018). Komponen tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*), keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan terkait segala aktivitas perusahaan dan dalam proses pembuatan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), aktualisasi, fungsi jelas, pertanggungjawaban dari pihak manajemen agar terwujudnya system tata kelola perusahaan dengan efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), ketepatan antara pengelolaan perusahaan dengan aturan undang-undang serta prinsip-prinsip entitas yang sehat.
4. Independen (*independency*), kondisi perusahaan yang pengelolaannya dengan profesional tanpa penyimpangan konflik kepentingan, serta tanpa pengaruh dari pihak lain yang tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan.
5. Keadilan (*fairness*), kesetaraan pemenuhan hak-hak bagi kepentingan dari para pemilik saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*).

Menurut Siswanto Sutojo dan Jhon E. Aldribge dalam (Hamdani, 2016) GCG memiliki tujuan untuk memberi perlindungan atas hak dan kepentingan

pemilik saham, dan *stakeholders* yang tidak memiliki atau bukan merupakan pemegang saham, peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja pengurus perusahaan dan manajemen perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan pemilik saham, dan meningkatkan kualitas hubungan dewan pengurus dan manajemen senior perusahaan. Menurut IIGC, penerapan GCG membantu perusahaan mengecilkan jumlah *agency cost* yang dikeluarkan, meminimalkan *cost of capital*, serta membantu dalam peningkatan nilai saham perusahaan dan pandangan masyarakat terhadap perusahaan. Mekanisme GCG yang menjadi objek penelitian ini adalah Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit.

2.3.1. Komisaris Independen

Komisaris Independen (*Board Independent*) adalah dewan pengurus yang tidak memiliki suatu ikatan apapun dengan berbagai pihak, baik ikatan bisnis ataupun ikatan keluarga dengan pemilik saham maupun direksi perusahaan (D. Widyaningsih, 2018). Komisaris suatu perusahaan memiliki tugas dan bertanggungjawab secara bersama dalam melakukan *me-monitoring* dan sebagai penasihat bagi direksi perusahaan serta memastikan adanya penerapan GCG pada perusahaan tersebut. (Arlita et al., 2019) Komisaris independen selaku penengah pada saat terjadi perselisihan antara manajer internal dan pengawas kebijakan direksi perusahaan. Meskipun begitu, komisaris tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Komposisi dari komisaris independen diharapkan dapat mengecilkan permasalahan agensi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan *stakeholders*.

2.3.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah atau persentase saham perusahaan yang menjadi hak manajemen (direksi, manajer, dan komisaris). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dapat menyetarakan kepentingan dari berbagai pihak demi meminimalisasi konflik kepentingan yang terjadi pada manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan saham ini membuat manajer menjadi lebih berwaspada dalam bertindak, karena manajer turut merasakan dampak yang ada sebagai akibat dari keputusan yang dibuat. Tidak hanya itu, dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen, *agency cost* dapat berkurang. Semakin tinggi kepemilikan manajemen dalam suatu entitas, manajemen akan membuat kinerja yang lebih meningkat demi kepentingan investor dan kepentingannya pribadi.

2.3.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah atau persentase kepemilikan saham entitas yang dipegang oleh institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi keuangan atau lembaga keuangan non bank atau institusi yang bergerak dibidang jasa khususnya dalam hal pengelolaan dana perusahaan atau pihak lainnya. Institusi adalah lembaga yang berkepentingan terhadap investasi yang dilakukan divisi tertentu yang tugas utamanya mengelola investasi perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan, menandakan tingkat pengendalian yang baik terhadap perusahaan yang dilakukan oleh eksternal perusahaan dan mengakibatkan *agency cost* berkurang dan nilai

perusahaan meningkat. Dalam pernyataan Jensen & Meckling mengatakan kepemilikan institusional memiliki peranan penting, dengan kepemilikan institusional yang terdapat pada suatu perusahaan, *monitoring* terhadap kinerja manajemen dapat meningkat, sehingga dapat mengecilkan konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan.

2.3.4. Komite Audit

FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) mengatakan bahwa komite ini mempunyai tugas yang dipisah dalam menopang dewan komisaris perusahaan, terutama pada hal-hal yang terkait pada kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, *monitoring* yang dilakukan terhadap internal perusahaan, dan sistem pelaporan keuangan. Tanggung jawab komite audit tidak hanya melakukan pengawasan internal perusahaan, komite audit juga bertindak sebagai perantara bagi komisaris dan pemilik saham dengan kegiatan pengontrolan yang manajemen selenggarakan beserta auditor internal maupun eksternal. Kunci utama sebagai komite audit ialah independensi. (Cahyadi & Mertha, 2019) Semakin tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan komite audit suatu perusahaan, akan meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Pada Bab I yang telah diuraikan dilatar belakang, penelitian ini mengacu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan salah satu dosen Universitas Putera Batam dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan

yang Terdaftar di BEI” (Janrosi & Lim, 2019). Bedanya penelitian ini dengan yang sebelumnya ialah objek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang termasuk di Bursa Efek Indonesia, khususnya sektor industri barang konsumsi (*consumer goods industry*). Penelitian tersebut menyatakan komite audit, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen memberi pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Keempat variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan memanajemen laba. Hasil penelitian tersebut yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen memberi berpengaruh terhadap manajemen laba, berbanding terbalik dengan penelitian kali ini. Hal ini dapat disebabkan jumlah komisaris dan jumlah kepemilikan saham oleh manajemen yang dimiliki perusahaan berbeda-beda setiap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Auditor dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba” (Rahmawati et al., 2017) suatu studi empiris yang meneliti perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Variabel yang digunakan untuk meneliti *Corporate Governance* terdiri atas kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penelitian membuktikan bahwa keempat mekanisme tersebut tidak memberi pengaruh pada manajemen laba.

Penelitian serupa dilakukan dengan judul penelitian “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”

(Hidayat, 2016), studi empiris terhadap perusahaan LQ45 yang termasuk perusahaan *listed* Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011-2014. Hasil uji hipotesis pada penelitian tersebut menunjukkan komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang signifikan pada manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial tidak memberi pengaruh signifikan pada manajemen laba.

Pada penelitian “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba” (Giovani, 2017) juga memiliki pendapat yang berbeda. Dalam penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan manajerial memberikan pengaruh signifikan negatif pada manajemen laba, kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh signifikan pada manajemen laba. Komisaris yang merupakan salah satu variabel X penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu independensi dan ukuran dari dewan komisaris perusahaan. Independensi dewan komisaris pada penelitian tersebut tidak memberi pengaruh signifikan pada manajemen laba dan ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh signifikan negatif pada manajemen laba. Komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada manajemen laba.

Penelitian lainnya oleh (Yogi & Damayanthi, 2016) dengan hasil penelitian yang akan dikutip oleh peneliti hanya proksi-proksi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kepemilikan institusional yang merupakan variabel yang digunakan untuk GCG ditunjukkan tidak memberikan pengaruh pada manajemen laba.

“Pengaruh Mekanisme GCG, Kualitas Audit, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI” (Partayadnya & Suardikha, 2018) memiliki hasil yang juga memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Yang berpengaruh positif terhadap manajemen laba yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional, komite audit memberi pengaruh yang negatif pada manajemen laba, sedangkan mekanisme GCG yang tidak berpengaruh ialah kepemilikan manajerial.

(Cahyadi & Mertha, 2019) Dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba”, dengan mekanisme GCGnya komite audit, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa yang memiliki pengaruh positif signifikan hanya dewan komisaris, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada manajemen laba.

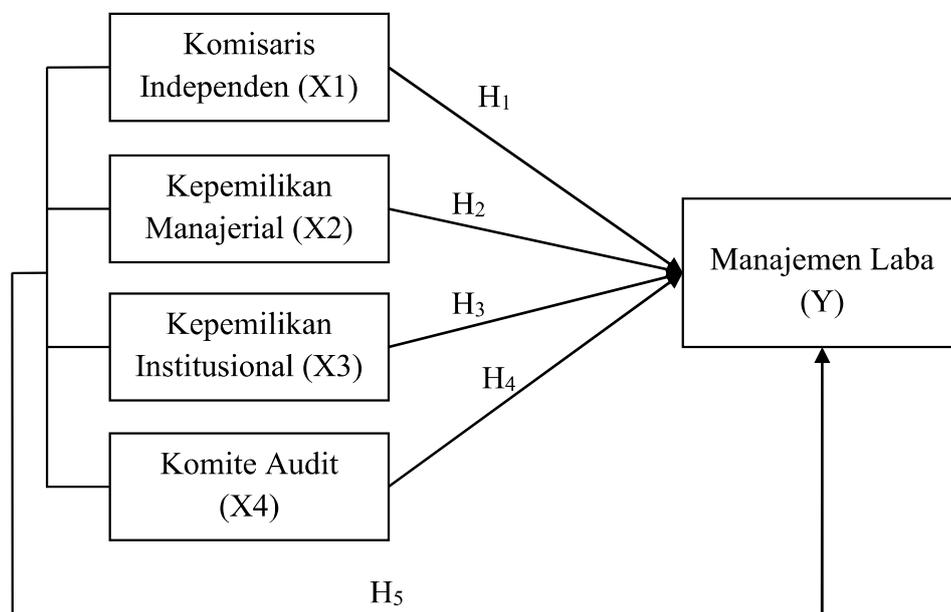
Penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance dan *Leverage* Terhadap Praktik Manajemen Laba” (Arlita et al., 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap manajemen laba riil.

(Mahadewi & Krisnadewi, 2017) “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Manajemen Laba”, penelitian ini menyimpulkan kepemilikan manajerial dan institusional memberi pengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan yang berpengaruh positif hanya komisaris independen.

(A. Santoso, 2016) “Pengaruh Konvergensi IFRS, Struktur Kepemilikan Saham, Tata Kelola Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba”, hasil menunjukkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit memberi pengaruh negatif pada manajemen laba.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka ini menggambarkan hubungan secara parsial ataupun secara simultan antara variabel tidak terikat dengan variabel terikat. Sehubungan dengan penelitian ini mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba, kerangka pemikiran pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan ilustrasi pada kerangka pemikiran, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur dibidang industri barang konsumsi.
2. H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur dibidang industri barang konsumsi.
3. H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur dibidang industri barang konsumsi.
4. H₄: Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur dibidang industri barang konsumsi.
5. H₅: Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur dibidang industri barang konsumsi.